



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. II Medan - 20143
Telp. (061) 7852252 Fax. (061) 7852256 Website : dpmptsp.pemkomedan.go.id
Email: dpmptsp@pemkomedan.go.id

Medan, 16 Februari 2023

Kepada Yth:

Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Medan

di-

Medan

Nomor : 050/DPMPSTSP/0646
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja

Menindaklanjuti Surat Sekretariat Daerah Kota Medan Nomor 060/0429 tanggal 24 Januari 2022 perihal Permintaan Laporan Kinerja, berikut terlampir disampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Demikian disampaikan, untuk proses selanjutnya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN,

NURBAITI HARAHAH, S.Sos, M.AP

Pembina Tk. I(IV/b)

NIP 197209041993022001

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN
JL. JENDERAL BESAR ABDUL HARRIS NASUTION NO. 32 LT. II-III
MEDAN-20143**

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan memuat :

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Selanjutnya berdasarkan implementasi pelaksanaannya, maka capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib, pilihan dan fungsi penunjang selama Tahun 2022, khususnya capaian kinerja program dan kegiatan tersebut di atas dituangkan dengan menggunakan tabel.

I. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

I.1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

I.1.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan	Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.	1. Program Promosi Penanaman Modal	5 kali pameran	5 Kali Pameran (100 %)	1. DPMPTSP hanya sebagai peserta bukan sebagai panitia sehingga bidang promosi hanya mengikuti pameran saja pada 4 kali pelaksanaan pameran 2. Tidak pernah melaksanakan promosi penanaman modal di luar kota Medan	Diusulkan agar membuat kegiatan sendiri dengan cara menaikkan anggaran promosi sehingga kita dapat mengarahkan kegiatan investasi	-
			1.1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5 kali pameran	5 Kali Pameran (100 %)	Jangkauan promosi hanya melalui pameran dan terbatas dalam kota. Selain itu, DPMPTSP hanya sebagai peserta bukan penyelenggara.	Jangkauan perlu diperluas ke luar kota dan luar negeri kemudian menyelenggarakan pameran sendiri.	-
			1.1.1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen (100%)	Hasil kajian ini terkait dengan banyak sektor, baik di bidang DPMPTSP maupun di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Tanpa kolaborasi, promosi tidak berjalan efektif	Perlu dilakukan langkah-langkah peningkatan kolaborasi, salah satunya dengan pembentukan satuan tugas penanaman modal.	

Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			1.1.2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	5 kali pameran	5 Kali Pameran (100 %)	Pameran hanya dilakukan di dalam kota. Selain itu, DPMPTSP hanya sebagai peserta bukan penyelenggara.	Jangkauan perlu diperluas ke luar kota dan luar negeri. Agar DPMPTSP menyelenggarakan sendiri pameran investasi sehingga lebih fokus dan diharapkan lebih berdampak.	-
		Perka BKPM No 3 Tahun 2019 tentang tata cara Penanaman Modal	2 Program Pelayanan Penanaman Modal	83 IKM	88,22 IKM	-	-	-
			2.1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15000 izin	13.065 izin yg diterbitkan sesuai dengan SP (100 %)	Peraturan perundang-undangan yang sering mengalami perubahan	Meningkatkan kompetensi SDM agar lebih memahami Peraturan	-
			2.1.1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100 %	100%	-	-	-

Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			2.1.2. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	100 %	100%	-	-	-
		Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	3 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	100%	-	-	-
			3.1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	1 Laporan Kegiatan Penanaman Modal (100 %)	Masih banyak pemohon yang belum mengerti cara pengerjaan LKPM online	Membuat bimbingan teknis penyusunan LKPM online atau bisa langsung datang ke kantor DPMPTSP untuk mengetahui cara pengisian LKPM	-
			3.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	220 perusahaan	220 perusahaan (100%)	Masih banyak pemohon yang belum mengerti tentang aplikasi OSS (Online Single Submission)	Membuat bimbingan teknis tentang aplikasi OSS (Online Single Submission)	-

Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
		PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah	4. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	4 Regulasi	4 Regulasi (100%)	-	-	-
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah	4.1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 Regulasi	2 Regulasi (100%)	-	-	-
			4.1.1. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Regulasi	1 Regulasi (100%)	Penetapan Draft Perwal SOP dan SP belum di tandatangani	Draft Perwal diajukan di tahun 2023	
			4.2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Regulasi	2 Regulasi (100%)	-	-	-
			4.2.1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen (100%)	-	-	-
			4.2.2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen (100%)	Data sebaran di lapangan tidak merata	Membuat tim untuk pengambilan sampel data lapangan	-

Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
		Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal.	5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1 Aplikasi	1 Aplikasi	-	-	-
		Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	5.1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Aplikasi	1 Aplikasi	-	-	-
		Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	5.1.1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Tidak sinkronnya data yang bersumber dari daerah dengan data dari pusat	Membangun 1 aplikasi umum tentang satu data seindonesia	-

1.1.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2022 dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Nilai	Pencapaian
85 s/d 100	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
70 s/d < 85	Tercapai/ Berhasil
55 s/d < 70	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
0 s/d < 55	Kurang tercapai/ Kurang berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Pada bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan sasaran kinerja strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- **Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target

dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja DPMPSTP Kota Medan Tahun 2022

No	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran	Realisasi	Capaian		
								Persen	Ordinal	Predikat
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Nilai Investasi PMA	1.	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMA	Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMA	US \$ (Ribu)	44.385,00	41.136,00	92,68%	92,68	Sangat Tercapai
2.	Nilai Investasi PMDN	2.	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Rp (Juta)	4.550.721,56	3.540.373,00	77,79%	77,97	Tercapai
		3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83	88,22	106,28%	106,28	Sangat Tercapai
Rata-rata capaian kinerja								92,25%	92,25	Sangat Tercapai

Sumber dari Kementerian Investasi/BKPM-RI dan Website DPMPSTP Kota Medan

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dari 3 target indikator kinerja diperoleh hasil 2 indikator memperoleh capaian sangat tercapai dan 1 indikator tercapai. Secara keseluruhan rata-rata nilai capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebesar 92,25% dapat dikategorikan **Sangat Tercapai** dengan rincian sebagai berikut:

1) Persentase Kenaikan/Penurunan nilai realisasi PMA

Persentase kenaikan/penurunan nilai realisasi PMA di kota Medan menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di kota Medan. Capaian kinerja jumlah nilai realisasi PMA di kota Medan pada tahun 2022 mencapai US \$ Ribu. 41.136,00 dari target US \$ Ribu. 44.385,00 atau dengan capaian sebesar 92.68% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

2) Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

Pencapaian kinerja nilai realisasi investasi PMDN kota Medan pada tahun 2022 sebesar Rp.3.540.373.000.000 dari target Rp. 4.550.721.560.000 atau dengan capaian sebesar 77.79 % dan masuk dalam kategori **Tercapai**.

3) Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan di tahun 2022 sebesar 88.22 dari target sebesar 83, dengan sebesar 106.25% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

Salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerimaan pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan adalah dengan cara online yang telah tersedia di website SKM Online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Untuk penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Publik, yang meliputi 9 unsur aspek layanan yaitu: : (1) Persyaratan; (2) Prosedur; (3) Waktu pelayanan; (4) Produk layanan; (5) Kompetensi pelaksana; (6) Perilaku pelaksana; (7) Sarana dan prasarana; (8) Penanganan pengaduan; dan (9) Kebersihan.

Berdasarkan tanggapan yang diterima dari responden kemudian dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang pada masing-masing aspek layanan. Hasil survey dan pengolahan data Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan memperlihatkan bahwa nilai rata-rata per unsur dengan menggunakan rumus di bawah ini.

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.111$$

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

$$\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Tabel 3.2
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,06 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,53 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Dalam mengukur kinerja pelayanan publik di DPMPTSP Kota Medan, digunakan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui survey terhadap layanan publik yang dikelola oleh DPMPTSP Kota Medan. Survey dilakukan secara langsung terhadap setiap pemohon yang akan mengambil izin untuk diwajibkan mengisi format survey indeks kepuasan masyarakat yang meliputi 9 unsur. Hasil survey kepuasan masyarakat pada DPMPTSP Kota Medan dapat dilihat pada table 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada DPMPTSP Kota Medan Tahun 2022

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata Tertimbang	Nilai Unsur	Kinerja Unsur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persyaratan	3.504	0.389	87.60	Baik
2	Prosedur	3.492	0.388	87.30	Baik
3	Waktu Pelayanan	3.448	0.383	86.19	Baik
4	Produk Layanan	3.896	0.432	97.40	Sangat Baik
5	Kompetensi Pelaksana	3.443	0.382	86.08	Baik
6	Perilaku Pelaksana	3.442	0.382	86.06	Baik
7	Sarana dan Prasarana	3.432	0.381	85.79	Baik
8	Penanganan Pengaduan	3.381	0.375	84.52	Baik
9	Kebersihan	3.702	0.411	92.55	Sangat Baik
Jumlah		31.740	3.523	793.50	
Rata-Rata		3.53	0.391	88.22	Baik

Pencapaian terhadap indikator sasaran tersebut juga terpenuhi melalui Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan yang terdiri dari kegiatan:

- a. Peningkatan serapan realisasi target perizinan dan non perizinan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan realisasi target pendapatan dari setiap tagihan retribusi perizinan yang belum dibayarkan oleh pemohon.
- b. Peningkatan kinerja Tim Penerbitan Perizinan, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memantau dan membahas pelaksanaan proses pengajuan sampai dengan penerbitan perizinan dan non perizinan. Selama Tahun 2022 dokumen perizinan yang telah diterbitkan sebanyak 13.065 izin melalui izin mandiri dan melalui aplikasi Sipandu dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4
Jumlah Penerbitan Izin dan Non Perizinan Kota Medan Tahun 2022

No	Jenis Perizinan Dan Non Perizinan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Izin Kerja Tenaga Kesehatan	589
2	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal	186
3	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	73
4	Izin Praktik Tenaga Kesehatan	9.091
5	Pencabutan Izin Tenaga Kesehatan	768
6	Sektor Kesehatan	387
7	Sektor Perhubungan / Transportasi	4
8	Sektor Perindustrian	1
9	Sektor Pertanian	10
10	Tanda Daftar Gudang	42
11	Ijin Reklame (Kendaraan Berjalan)	2
12	Izin Mendirikan Bangunan	1.744
13	Izin Mendirikan Bangunan Untuk Reklame	26
14	Izin Reklame (Billboard/Videotron/Megatron/Bando)	120
15	Izin Reklame (Umbul-Umbul/Menempel/Neon/Rombong/Mini Billboard)	7

Sumber DPMPTSP Kota Medan Tahun 2022

1. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022

a. Realisasi dan Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja

Realisasi dan capaian kinerja terhadap indikator kinerja tahun 2021-2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Realisasi dan Capaian DPMPTSP Kota Medan Tahun 2021 dan 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja		Capaian	
				2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMA	Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMA	US \$ (Ribu)	57.196,3	41.136,00	100	92.68
2.	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Rp (Juta)	5.121.015,3	3.540.373,00	100	77.79
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82.79	88.22	100	106.25

Sumber Kementerian Investasi/BKPM-RI dan Website DPMPTSP Kota Medan

Dari tabel 3.6. di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 untuk Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMA, persentase kenaikan/ penurunan nilai realisasi PMDN dan Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai target yakni masing-masing dengan capaian 100% ,sedangkan untuk tahun 2022 untuk Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMA dan Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN belum dapat mencapai target yakni masing-masing capaian sebesar 92.68 % dan 77.79 %, namun untuk Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai target yakni 100%.

Sedangkan untuk pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk tahun 2021 telah menerbitkan izin sebanyak 11.014 izin dan pada tahun 2022 jumlah izin yang diterbitkan yaitu sebanyak 11.191 izin. Jumlah izin yang terbit pada tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dijelaskan melalui tabel 3.6 di bawah ini:

Tabel 3.6
Realisasi dan Capaian Izin Yang diterbitkan DPMPTSP Kota Medan Tahun 2021-2022

No.	Jenis Izin	Target		Realisasi		Capaian	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1.	Izin Aplikasi Mandiri dan SIPANDU	15.000	15.000	11.014	13.065	73.42%	87,10%

Sumber Website Izin DPMPTSP Kota Medan

➤ Analisis Pencapaian Kinerja

1) Persentase Kenaikan/Penurunan nilai realisasi PMA

Persentase kenaikan/penurunan nilai realisasi PMA di kota Medan menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di kota Medan. Capaian kinerja jumlah nilai realisasi PMA di kota Medan pada tahun 2021 mencapai US \$ Ribu. 57.196,3 dari target US \$ Ribu. 42.271,43 atau tercapai sebesar 100% dan masuk dalam kategori sangat tercapai. Sedangkan capaian realisasi PMA tahun 2022 adalah sebesar US \$ Ribu. 41.136,00 dari target 44.385,00 atau sekitar 92,68% dari target yang ditetapkan dan dikategorikan **Sangat Tercapai**.

2) Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

Pencapaian kinerja nilai realisasi investasi PMDN kota Medan pada tahun 2021 sebesar RP. 5.121.015,3 Juta dari target 4.334.020,53 atau tercapai sebesar 100%. Sedangkan tahun 2022 realisasi PMDN Rp 3.540.373,00 Juta dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 4.550.721,56 Juta. Maka untuk hasil nilai realisasi PMDN pencapaiannya sebesar 77,79% dan masuk dalam kategori **Tercapai**.

4) Indeks Kepuasan Masyarakat

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan di tahun 2021 adalah 82,79 dari target 82 dan dikategorikan sangat berhasil dengan pencapaian 100%. Sedangkan pencapaian di tahun 2022 sebesar 88,22 dari target sebesar 83 dengan kenaikan mencapai 106,25% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

Berbagai kegiatan rutin dan kegiatan Inovasi di bidang Pelayanan Perizinan Usaha dalam rangka sosialisasi untuk mendorong masyarakat menggunakan media online perizinan diantara adalah

1. Kegiatan Jempol dan Kelingking (jemput bola dengan mobil keliling)

Dasar hukum : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor : 067/DPMPSTP/4430 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan jemput bola dan kelingking (jemput bola dengan mobil keliling) dalam rangka penerbitan perizinan berusaha pada pelaku usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Kota Medan.

2. Kegiatan Kamis Ceria

Dasar hukum : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor : 067/dpmptsp/4429 tentang

pembentukan tim pelaksana kegiatan Kamis Ceria layanan perizinan usaha mikro dalam rangka penerbitan perizinan berusaha pada pelaku usaha umk melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Kota Medan.

3. Kegiatan Kios OSS Layanan Perizinan Usaha Mikro

Dasar Hukum : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor : 067/Dpmpmsp/4431 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kios Oss Layanan Perizinan Usaha Mikro Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Pada Pelaku Usaha Umk Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Di Kota Medan

B. Masalah dan Solusi

➤ Masalah

Permasalahan dan tantangan dalam mencapai target kinerja:

- Perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk terus mengembangkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih cepat dan transparan.
- Masih terdapat beberapa perizinan yang rekomendasi teknis diperoleh dari OPD Teknis yang membidangnya, mengakibatkan layanan perizinan/non perizinan membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang.
- Kurangnya SDM teknis yang membidangi pelayanan perizinan secara teknis.

➤ Solusi :

- Sosialisasi peraturan, kebijakan dan SOP yang dilakukan secara terjadwal dengan melibatkan stakeholder terkait.
- Penyebarluasan informasi terkait pelayanan perizinan cepat dan transparan.
- Dilakukan perekrutan Tenaga Ahli bidang teknis yang memenuhi standar.
- Pemenuhan Sarana dan prasarana.
- Kolaborasi dan kordinasi dengan OPD teknis terkait guna percepatan pelayanan perizinan dengan merujuk kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

C. Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja adalah :

- Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.

- Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan seluruh Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
- Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan pendukung teknis yang memadai dalam pelaksanaan layanan perizinan dan non perizinan.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penyederhanaan persyaratan pelayanan perizinan.
- Keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai persyaratan, prosedur dan biaya dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat diakses melalui website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
- Dikembangkannya sistem yang memudahkan pemohon dalam mengajukan izin dan non perizinan secara online.
- Dilakukannya pengendalian pelaporan LKPM sehingga dapat diketahui besarnya investasi yang telah ditanamkan oleh investor di Kota Medan.
- Adanya kegiatan BIMTEK LKPM Online yang diadakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

1.1.3 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antar target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2022, realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah berdasarkan Perjanjian Kinerja OPD terdapat 6 program sasaran yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Adapun analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja adalah sebagai berikut ini

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 (enam) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan. Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota antara lain:

- Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ditargetkan 1 dokumen dengan realisasi 1 dokumen selama 1 (satu) tahun dan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ditargetkan 1 (satu) dokumen dengan realisasi 1 (satu) dokumen laporan selama 1 (satu) tahun.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar dengan rincian untuk sub kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN selama 12 bulan sebanyak 143 ASN dengan realisasi 12 bulan sebanyak 134 ASN dan sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD ditargetka 1 laporan dengan realisasi 1 laporan dalam setahun, serta sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD terealisasi 1 (satu) laporan.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan rincian untuk sub kegiatan: Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan realisasi pemetaan jaringan listrik kantor dan proteksi jaringan listrik kantor selama 12 bulan, Penyediaan bahan logistik kantor untuk makanan dan minuman tamu dan alat tulis kantor selama 12 bulan, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yaitu cetak dan penggandaan Dokumen-dokumen untuk 12 bulan, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan realisasi 6.000 eksemplar dan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan realisasi 1 (satu) dokumen laporan selama 1 (satu) tahun.
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 1 (satu) kegiatan, dengan rincian untuk sub kegiatan: Pengadaan Mebel dengan realisasi untuk 1(satu) tahun yaitu meja kerja, kayu, kursi rapat, kursi kerja pejabat, bangku tunggu, lemari buku arsip sofa, AC dan Televisi. Pengadaan sarana dan prasarana gedungkantor atau bangunan lainnya untuk 1 (satu) tahun yaitu pengadaan mesin fotocopi, alat penghancur kertas, LCD Proyektor, Layar LCD Projector dan Papan nama instansi dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam 1 (satu) tahun.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rincian untuk sub kegiatan: Penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 19 orang. Penyediaan

jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan dan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebanyak 5 orang.

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi selama 1 (satu) tahun dengan rincian untuk sub kegiatan: Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan selama 1(satu) tahun sebanyak 4 unit kendaraan roda empat dinas, 2 unit kendaraan untuk angkut barang (pic up) dan 1 unit kendaraan mobil keliling. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 10 unit kendaraan. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yaitu perbaikan Toilet, Ruang tunggu depan dan Ruang lobi dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan target 100% pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka capaiannya adalah sebesar 89,79%. Hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan '*sesuai*'.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Pada Program Promosi Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan, yakni:

- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal. Pada sub kegiatan ini ditargetkan 2 (dua) media promosi penanaman modal dan terealisasi 2 media promosi penanaman modal dalam 1 (satu) tahun.
- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota. Pada sub ini ditargetkan 5 kali pameran, realisasi pelaksanaan sebanyak 5 kali pameran,

Berdasarkan capaian Program Promosi Penanaman Modal dalam 1 tahun sebesar 100% maka hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan '*sesuai*'.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Pada Program Pelayanan Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan antara lain:

- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, pada sub kegiatan ini ditargetkan 15.000 izin yang terbit dan terealisasi sebanyak 13.065 izin yang diterbitkan dalam 1 (satu) tahun.
- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan terealisasi 100% aduan masyarakat yang terselesaikan dalam 1 tahun.

Pada capaian Program Pelayanan Penanaman Modal ini ditargetkan persentase yang terselesaikan sebesar 100 % dan capaian kinerja yang terealisasi sebesar 93,55 % sehingga berdasarkan capaian Program Pelayanan Penanaman tersebut maka hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan '*sesuai*'.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, yakni : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal. Pada sub kegiatan ini ditargetkan jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang dibina sebanyak 200 Perusahaan dan capaian kinerja yang terealisasi sebesar 220 Perusahaan sehingga berdasarkan capaian Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar 100% maka hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan '*sesuai*'.

5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu:

- Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan: Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan target 2 (dua) regulasi dengan realisasi 2 (dua) regulasi dalam 1 tahun.
- Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan dengan sub kegiatan: Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan target 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen RUPM Kota medan. Sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota dengan target 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen peta potensi dalam 1 (satu) tahun..

Berdasarkan target 100% dari Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal maka realisasi sebesar 100%, sehingga hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan *'sesuai'*.

6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pada Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu: Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan target 1 Aplikasi dan terealisasi 1 (satu) aplikasi yang terintegrasi pada daerah kota Medan dalam 1(satu) tahun.

Berdasarkan target 100% dari Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal maka realisasi tercapai sebesar 100%, sehingga hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan *'sesuai'*.

3.2 Kebijakan Strategis Yang ditetapkan

Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi, dan meningkatkan iklim berinvestasi di Kota Medan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 4. Perka BKPM No.3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik. 5. Perwal Kota Medan No.26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada 	Agar penyebaran informasi potensi, promosi dan peluang investasi lebih ditingkatkan agar investor PMA/PMDN lebih tertarik untuk berinvestasi di Kota Medan.

	Kepala DPMPTSP Kota Medan.	
Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Kota Medan, serta implementasi sistem pelayanan perizinan dengan pusat (OSS).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 2. Peraturan Walikota Medan No 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan. 3. Peraturan Walikota Medan No 34 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Kota Medan. 	Agar proses pelayanan perizinan dapat diselesaikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Mengoptimalkan fungsi pemusatan database potensi investasi, pengolahan informasi peluang investasi, sebagai alat perencanaan, pelayanan, pengendalian dan pembinaan dalam meningkatkan realisasi investasi di Kota Medan"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perka BKPM No 3 Tahun 2019 tentang tata cara Penanaman Modal 	Tersedianya database-database terkait Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal di Kota Medan.
Meningkatkan penanaman modal dibidang usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwal No 34 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Kota Medan. 	Agar perusahaan-perusahaan (PMA dan PMDN) dapat memahami dalam pengisian laporan kegiatan penanaman modal/LKPM.

Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan guna meningkatkan indeks kepuasan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 	Untuk meningkatkan indeks pelayanan perizinan dan penanaman modal DPMPTSP Kota Medan
--	--	--

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun 2022

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	TIDAK ADA	-	-



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN,
NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I(IV/b)
 NIP 197209041993022001

**INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN TAHUN 2022**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
18	Penanaman Modal		Nilai Invetasi PMA dan PMDN	$\frac{\text{Jumlah Realisasi PMDN Tahun 2022}}{\text{Target PMDN Tahun 2022}} \times 100\%$	$\frac{41.136.000}{44.385.000} \times 100\% = 92,68 \%$	Sumber Data BKPM-RI Tahun 2022	Investasi PMDN Tahun 2022 tercapai.
				$\frac{\text{Jumlah Realisasi PMA Tahun 2022}}{\text{Target PMA Tahun 2022}} \times 100\%$	$\frac{3.540.373.000.000}{4.550.721.560.000} \times 100\% = 77,80 \%$	Sumber Data BKPM-RI Tahun 2022	Investasi PMA Tahun 2022 tercapai.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN,
NURBAITI HARAHAH, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I(IV/b)
 NIP 197209041993022001

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN TAHUN 2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
18	Penanaman Modal	361	PERDA mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota		-	-	Rancangan Perda sudah masuk dalam Prolegda tahun 2023 dan tinggal menunggu pembahasan untuk penetapan Perda.
		362	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal		-	-	SOP masih dalam proses permohonan eksaminasi ke bagian Hukum.
		363	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal		-	-	Belum ada Perda krn Perda belum di sahkan.
		364	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting			5 kali bimbingan teknis Penanaman Modal	DPMPTSP

		365	Kegiatan pameran penanaman modal		3 laporan pelaksanaan pameran	DPMPTSP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pameran APEKSI EXPO Tahun 2022 (Medan City Expo) 2. Pameran Produk Unggulan Perdagangan Pertanian, Pariwisata dan Investasi “MEDAN ITT EXPO 2022” 3. Pameran Indonesia Tourism and Trade Investment Expo 2022. 4. Pameran Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2022 5. Kegiatan Medan Investment Business Forum and Expo 2022 (MIBFE). 6. Talkshow Radio dengan Topik Sosialisasi Aplikasi Sipandu Medan. 7. Talkshow Radio dengan Topik Tata cara Penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) 8. Talkshow Radio dengan Topik Potensi Pengembangan Usaha Properti Ditinjau Dari Rencana Detail Tatat Ruang di Kota Medan.
		366	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal		-	-	-
		367	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal		5 Laporan pelayanan perizinan	DPMPTSP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan One Day Service dengan mobil pelayanan perizinan DPMPTSP untuk pelayanan izin kesehatan seperti Surat Izin Praktek (SIP) dan Surat Izin Kerja (SK). 2. Layananan Perizinan Berusaha dengan Mobil Pelayanan Publik DPMPTSP di Kecamatan-kecamatan bagi pelaku usaha mikro perorangan di Kota Medan. 3. Layanan KAMIS CERIA (Perbantuan Fasilitasi

						<p>Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Bagi Pelaku Usaha Mikro Perorangan di Kantor DPMPTSP Kota medan) untuk para pelaku usaha mikro perorangan.</p> <p>4. Konsultasi OSS-RBA dan Perbantuan UMK untuk pelaku usaha di Manhattan Times Square dalam acara Medan Investment, Agriculture Tourism DAN Trade Expo 2021.</p> <p>5. Kegiatan Jempol dan Kelingking (Jemput bola dengan mobil keliling)</p>	
		368	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal		13.065 izin	DPMPTSP	Jumlah izin yang terbit selama tahun 2022
		369	Laporan realisasi penanaman modal		1 Laporan	BKPM-RI	Laporan Kegiatan Penanaman Modal
		370	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kab/kota		2 Kali Bimtek	DPMPTSP	<p>1. Coaching clinic pelayanan public bagi aparatur pelayanan DPMPTSP.</p> <p>2. Pelatihan peningkatan SDM kepada ASN DPMPTSP.</p>
		371	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN		1 Laporan	DPMPTSP	Kegiatan pembinaan dan pemantauan perusahaan PMA dan PMDN
		372	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kab/kota		2 Dokumen	DPMPTSP	<p>1. Data Perizinan TA. 2022</p> <p>2. Data Non Perizinan TA. 2022</p>



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN,**

NURBAITI HARAHAH, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I(IV/b)
NIP 197209041993022001